

Analisis Aspek Diplomasi Kultural dalam Ekspedisi Pamalayu, 1275 – 1294 M

Diansasi Proborini

Diansasi Proborini

Hubungan Internasional Universitas Airlangga

ABSTRAK

Ekspedisi Pamalayu merupakan salah satu sejarah implementasi seni hubungan internasional Nusantara yang terjadi jauh beratus abad lalu lamanya, bahkan terjadi sebelum terbentuknya sistem negara Westphalia. Ekspedisi Pamalayu dilakukan atas mandat raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Dalam pelaksanaannya, ekspedisi Pamalayu mula-mula cenderung memperlihatkan intensi-intensi imperialisme terhadap kerajaan Melayu Dharmasraya. Namun daripada itu, pada implementasinya, banyak catatan sejarah yang tidak menemukan adanya indikasi pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa hal, ekspedisi ini lebih cocok untuk diidentifikasi sebagai praktek diplomasi kultural khas nusantara. Proses analisis dan identifikasi ekspedisi Pamalayu menjadi diplomasi kultural didasarkan pada tiga variabel, yaitu dari pendekatan, proses, dan hasil. Pun daripada itu, hasil yang seharusnya nampak pada diplomasi kultural adalah terciptanya kesepakatan bersama, yang mana hal tersebut benar terlihat pada hasil akhir dari ekspedisi Pamalayu ini.

Kata-kata kunci: *Ekspedisi Pamalayu, Diplomasi Kultural, Imperialisme Kultural.*

Pamalayu expedition is one of international relations art implementation in Southeast Asia's history. It took place hundreds of years ago, even before the Westphalian state system exists. Pamalayu expedition was conducted under the command of King Kertanegara from Singasari, against Melayu Dharmasraya. The initial intention of this policy tends to similar with imperialism way. Meanwhile, many historical records are not indicating any military engagement between the two of them. Even in some case, this expedition suits well with cultural diplomacy practices. The analysis and identification process to verify that Pamalayu expedition is more likely to be cultural diplomacy than cultural imperialism is based on three variables that has been simply developed, those are, approach, process, and output. However, it is inevitably valid that Pamalayu expedition is a military patterned expedition with a peaceful process and output, and capable to generate common ground as the core item of cultural diplomacy.

Keywords: *Pamalayu Expedition, Cultural Diplomacy, Cultural Imperialism.*

Indonesia merupakan negara yang sarat akan sejarah kejayaan di masa lampau. Salah satunya adalah sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang berlangsung sekitar ribuan tahun yang lalu. Dalam sejarah, hubungan antara Jawa (*Yavadvipa*) dengan Sumatra (*Svarnadvipa*) terlihat dalam beberapa aspek kebudayaan yang meliputi aspek religi, seni, politik, ekonomi dan teknologi. Relasi dalam aspek religi sangat erat kaitannya dengan aspek seni dan bahkan kadang juga terselip motif politik. Kedua tempat itu dinyatakan menjadi basis persebaran agama Buddha, walaupun Yavadvipa pada akhirnya dikuasai oleh Hindu dalam perkembangannya. Hubungan politik di antara kedua pihak ini terbilang pasang surut seiring dengan perkembangan konstelasi kekuatan global. Salah satu peristiwa bersejarah yang cukup terkenal antara kerajaan di Jawa dengan Sumatera adalah Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu merupakan ekspedisi yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari pada tahun 1275. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan menganalisis apakah Ekspedisi Pamalayu merupakan implementasi diplomasi kultural yang digagas oleh raja Kertanegara atau merupakan salah satu misinya untuk mengimperialisme wilayah kerajaan Melayu Dharmasraya.

Bahasan Singkat tentang Ekspedisi Pamalayu

Ekspedisi Pamalayu merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang cukup terkenal di abad ke-13. Ekspedisi Pamalayu dilaksanakan atas mandat raja Kertanegara dari kerajaan Singasari untuk membendung pengaruh ekspansionis dari Tiongkok, yaitu tepatnya Dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai Khan (Muljana, 1981: 233). Saat itu, ekspedisi Pamalayu dilakukan dengan cara mengerahkan pasukan Singasari yang sebanyak-banyaknya ke bumi Melayu hingga membuat situasi istana hampir kosong. Hal itu dibuktikan dengan tulisan dari kitab Pararaton yang menyatakan bahwa pasukan Tumapel (Singasari) yang tersisa di istana tinggal sedikit, banyak yang dikirim ke Malayu (Hardjowardojo, 1965: 37). Pasukan Singasari yang berangkat ke bumi Melayu dipimpin oleh seorang komandan perang, yaitu Kebo Anabrang. Sehubungan dengan hal ini, Raja Sri Kertanegara dapat dinyatakan sebagai sosok pertama Nusantara yang memiliki gagasan ekspansionis hingga ke luar Pulau Jawa, bukan Mahapatih Gajah Mada sebagaimana yang demikian banyak dipercayai orang-orang.

Istilah Pamalayu berasal dari bahasa sastra Jawa kuno yang berarti perang melawan Melayu (Muljana, 1979: 104). Walaupun dari segi penggunaan bahasa mengandung indikasi peperangan, namun dalam catatan sejarah tidak dinyatakan adanya pertumpahan darah dalam ekspedisi tersebut. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu anomali tersendiri dalam penggunaan istilah Ekspedisi Pamalyu. Inisiatif raja Kertanegara mengadakan ekspedisi ke kerajaan Melayu Dharmasraya, Sumatera, pada tahun 1275 diketahui karena ia ingin terlebih dahulu sampai di bumi Melayu sebelum kekuasaan Kubilai Khan. Demikian C. C. Berg dan Slamet Muljana sepakat bahwa tujuan ekspedisi Pamalayu adalah untuk 1) memperluas kekuasaan teritori Singasari, dan 2) untuk membendung pengaruh Kubilai Khan yang kian besar di Asia Tenggara (Muljana, 1976: 23).

Tidak dipungkiri bahwa pada awalnya perintah Raja Sri Kertanegara yang membawa bala tentara ke Kerajaan Melayu Dharmasraya dipersepsikan sebagai ancaman penaklukan militer. Dalam hal ini kebijakan ekspedisi Pamalayu seakan menjadi kebijakan imperialismenya, sama seperti ketika raja Kertanegara berusaha menguasai daerah-daerah di Jawa, Bali, dan Madura sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan yang berakibat fatal pada kelestarian kerajaan Singasari. Kendati demikian, apabila melihat data-data sejarah yang ada, ekspedisi Pamalayu memiliki *output* yang sedikit-banyak berbeda dengan yang terjadi terhadap daerah-daerah lain. Tidak ditemui adanya tulisan atau laporan para sejarahwan bahwa ekspedisi Pamalayu dilakukan dalam pertumpahan darah yang sengit di antara keduanya. Hal-hal yang terjadi dalam ekspedisi tersebut seakan mengindikasikan adanya proses-proses pembuatan kesepakatan antara dua

pihak yang dilakukan dalam suasana yang kooperatif. Dengan demikian, pada pembahasan selanjutnya akan dibedah bagaimana suatu ekspedisi yang semula dilakukan dalam nuansa militer dan penuh gairah imperialisme menjadi suatu ekspedisi yang berujung damai, bahkan dalam beberapa hal dekat dengan model diplomasi kultural.

Perbedaan Diplomasi Kultural dan Imperialisme Kultural

Sebelum kita mengidentifikasi apakah Ekspedisi Pamalayu merupakan diplomasi kultural atau imperialisme kultural, penting untuk mula-mula mengetahui perbedaan di antara keduanya. Diplomasi kultural memiliki konsep yang memuat budaya atau kultur sebagai salah satu cara maupun instrumen negara untuk mencapai tujuan atau kepentingannya. Definisi dari diplomasi kultural sendiri menurut ahli adalah pertukaran ide atau gagasan, informasi, seni dan aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan masyarakatnya untuk mendorong adanya pengertian dan pemahaman bersama (Cummings, 20013: 1). Demikian fungsi dan hasil dari diplomasi kultural adalah untuk membangun kesepahaman bersama (*common ground*) antara kedua pihak negara yang berinteraksi. Diplomasi kultural mengedepankan aspek-aspek kultural atau budaya sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan atau opini lawan. Budaya sebagai bentuk *soft-power* menjadi elemen yang dapat menimbulkan rasa kagum pada aktor-aktor lain sehingga mereka akan bersenang hati untuk menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara.

Kebesaran dan kemajuan budaya juga menjadi modal prestise tersendiri yang sekaligus memproyeksikan kemegahan negara. Di samping identitas nasional, identitas kultural dari suatu bangsa dan negara juga menjadi hal yang penting untuk memajukan negerinya. Hal ini berkaitan dengan cara pandang bersama. Ketika suatu bangsa memiliki cara pandang yang sama hal itu berarti bangsa tersebut memiliki semangat persatuan yang tinggi sehingga kepentingan nasionalnya akan lebih mudah dicapai. Diplomasi kultural menjadi salah satu instrumen untuk membangun kesepahaman bersama (*common ground*), sehingga tercipta suatu kesepakatan yang memungkinkan negara tersebut mencapai agenda nasionalnya. Diplomasi, dalam kerangka umum, ditujukan untuk mengamankan kepentingan negara. Dengan kata lain, tujuan diplomasi yang baik dan efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara. Demikian kepentingan terdepan suatu negara adalah keamanannya karena menyangkut nasib banyak pihak. Tetapi, selain pertimbangan yang vital, tentang keamanan nasional, diplomasi salah satunya juga bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya.

Sementara itu konsep teoritis imperialisme kultural dalam beberapa hal memiliki persamaan dengan diplomasi kultural. Hal itu tentu saja terletak pada penggunaan kultur atau budaya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingannya. Perbedaan di antara keduanya terletak pada cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan kepentingannya, dan jangkauan kekuasaannya yang lebih dalam. Imperialisme kultural didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan ekonomi dan politik untuk menyebarkan dan mengagungkan nilai-nilai dan kebiasaan budaya asing dalam budaya lokal (Bullock dan Stallybrass, 1977: 303). S.L. Roy menambahkan bahwa imperialisme kultural merupakan suatu usaha untuk menaklukkan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrumen untuk mengubah hubungan *power* (kekuatan) antara kedua negara (1995: 12-13). Dalam praktiknya, imperialisme kultural selalu melibatkan satu negara atau pihak yang lebih superior (unggul) dan satu pihak yang lebih inferior, sehingga negara yang inferior dapat dipengaruhi oleh negara yang superior. Hal itu sehubungan dengan esensi dari imperialisme kultural itu sendiri yang diartikan oleh Robert Cecil sebagai friksi antara kelompok ras, manusia, ataupun bangsa yang lebih kuat terhadap golongan yang lebih lemah dalam kerangka politik-

ekonomi (1971: 4). Friksi tersebut seringkali digambarkan dalam bentuk konflik perang kolonial maupun perang perjuangan kemerdekaan.

Masing-masing teori tersebut pada akhirnya memiliki perbedaannya satu sama lain. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga variabel yang menjadikannya sebagai faktor-faktor pembedanya. Pertama, dilihat dari segi **pendekatan**, diplomasi kultural dilakukan dengan cara-cara yang terbuka, umumnya merupakan konsumsi publik—seperti pameran kemegahan, membawa atribut-atribut kultur yang dapat menarik pihak yang diajak berdiplomasi, serta dilakukan oleh perangkat-perangkat politik pemerintahan. Pernyataan ini sejalan dengan fungsi dari diplomasi budaya itu sendiri yang menurut pemaparan S.L. Roy bahwa delegasi kebudayaan seringkali dikirim untuk membina hubungan baik dengan negara-negara lain (1995: 12). Di samping itu, keterbukaan diplomasi kultural adalah didasarkan pada kenyataannya sebagai bagian dari diplomasi publik. Untuk itu, upaya pembinaan hubungan baik pun sekiranya harus dilakukan dalam situasi yang damai. Ketika suatu negara ingin membina hubungan baik, ia tidak bisa melakukannya dengan cara-cara yang koersif karena hal tersebut akan mengundang agresivitas negara lawan sehingga suasana damai dan bersahabat akan sukar dibangun.

Sebaliknya, suatu aktivitas dapat diindikasikan sebagai gejala imperialisme kultural ketika budaya atau nilai-nilai yang disebar memanfaatkan pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang sudah berlaku dalam rangka penaklukan suatu wilayah. Imperialisme kultural merupakan produk insidental dari imperialisme politik dan ekonomi. Dengan demikian, untuk memungkinkan suatu negara *core* mengimperialisasi negara *periphery*, mereka harus mengimperialisasi wilayah tersebut secara politik maupun ekonomi, di mana hal tersebut sebagian besar dilakukan melalui pelibatan penggunaan *hard power*. Dalam hal ini istilah imperialisme sering dikaitkan dengan penggunaan *power* (kekuatan) sebagai aspek yang agresif dan penindasan. Aktivitas imperialisme juga dapat disebabkan karena adanya perhatian nasional yang cukup serius perihal keamanan (*security*). Beberapa pihak percaya bahwa kondisi aman suatu negara hanya dapat dicapai apabila negara memiliki kapasitas perang yang besar dan menjanjikan (Reynolds, 1981: 20). Keamanan juga bisa dicapai melalui pembentukan hegemoni dunia atau imperium. Konsep keamanan diperlukan untuk memelihara negara sebagai suatu entitas politik dan juga untuk memelihara integritas teritorialnya. Untuk itu, negara yang besar seringkali juga dikaitkan dengan kepemilikan sumber daya militernya yang besar juga. Imperialisme dapat didefinisikan sebagai kekuatan ketika terdapat alokasi sumber daya untuk pertahanan berdasarkan kapabilitas militer yang dimiliki dan yang diproyeksikan terhadap negara lain. Dengan demikian penggunaan alutsista perang dan serbuan pasukan militer sebagai metode awal imperialisme memproyeksikan kapabilitas militer suatu negara untuk mengintimidasi lawan bahkan sebelum perlawanan dimulai.

Kedua, dari segi **proses** aktivitas diplomasi kultural berlangsung secara relatif damai, yang mana dilakukan dengan bentuk pertukaran kultural berupa produk-produk budaya suatu daerah, bisa berupa pertunjukan, pameran, pertukaran pelajar, pertukaran cinderamata, dan lain-lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan penggunaan istilah diplomasi itu sendiri yang berarti penggunaan *soft power* dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Pun demikian diplomasi juga tidak menutup kemungkinan digunakannya kekuatan koersif sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya (Roy, 1995: 5), namun hal tersebut hanya digunakan sebagai pilihan terakhir apabila cara-cara damai tidak sukses. Diplomasi kultural sendiri umumnya dilakukan dengan cara memamerkan keagungan budayanya, dan apabila mungkin untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang didatangi. Ketika suatu negara atau kerajaan dapat memberi kesan baik bagi negara lain melalui warisan budayanya dan mengeksponnya ke negara lain, maka hal tersebut dapat menjadi pembangunan basis yang kuat untuk memperoleh dukungan atas masalah-masalah lain. Pameran kebudayaan ini seringkali lebih berguna daripada pameran kekuasaan militer, karena yang terpenting adalah bagaimana suatu kuasa dapat mengkomunikasikan nilai-

nilai masyarakat terhadap negara lain. Menurut J.W. Fulbright yang dikutip dalam S.L. Roy, aspirasi umat manusia pada dasarnya terbentuk dan diputuskan di dalam pikiran manusia, bukan di medan tempur atau di meja konferensi (1995: 12).

Sementara itu Napoleon, seorang tokoh fasis yang terkenal dalam upaya-upaya imperialismenya juga mengetahui kekuatan budaya sebagai suatu entitas yang dapat menaklukkan suatu negara. Menurutnya, ekspansi intelektual dan moral menjadi instrumen utama dalam membangun dan mengasimilasikan imperium kolonial kedua di akhir abad sembilan belas (Roy, 1995: 12-13). Dari uraian singkat tersebut proses imperialisme kultural adalah produk insidental imperialisme politik dan ekonomi, yang mana seringkali digambarkan melalui bentuk-bentuk eksploitasi dan penindasan. Proses penetrasi imperialisme kultural ke dalam suatu negara umumnya melalui proses-proses yang eksploitatif dan dominatif, di mana terdapat suatu kekuasaan hegemon yang menduduki dan menguasai suatu wilayah. Imperialisme kultural dilakukan oleh negara *core* untuk meningkatkan ketergantungan negara *periphery*. Ketika negara *periphery* menggantungkan kebudayaan cara-cara hidup dan berpikirnya terhadap negara *core*, maka mereka secara otomatis juga akan menggantungkan politik dan perekonomiannya. Dengan demikian, negara *periphery* akan terus mengimpor komoditas-komoditas, tidak terkecuali komoditas kultural, yang dimiliki oleh negara *core* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena ketidakmampuannya berinovasi dan berdiri sendiri.

Ketiga, perbedaan di antara diplomasi kultural dan imperialisme kultural diidentifikasi dari **hasilnya**. Diplomasi kultural dinyatakan berhasil apabila telah tercipta kesepahaman (*common ground*) di antara kedua belah pihak. *Common ground* sendiri pada dasarnya memiliki batas-batas aspirasinya sendiri. Suatu aspirasi dapat dinyatakan maksimum apabila negara yang diajak berdiplomasi menyetujui seluruh gagasan yang disampaikan, dan minimum apabila negara yang diajak berdiplomasi memilih untuk netral namun juga tidak ikut ke kubu lawan. *Common ground* atau kesepahaman sebagai gambaran umum dari hasil diplomasi pun memiliki beberapa aspek diantaranya, meningkatnya relasi persahabatan yang dibina melalui negosiasi dan diplomasi, meningkatnya prestise nasional, kemajuan kebudayaan dan penyebaran ideologi, kesepakatan ekonomi maupun perdagangan, kerjasama keamanan regional, dan lain sebagainya.

Sementara itu, imperialisme kultural memakai kolonialisme sebagai indikator keberhasilannya, yang berarti tunduknya suatu wilayah inferior dengan kekuasaan yang superior sebagai bentuk penjajahan yang termasuk dalam imperialisme. Bentuk-bentuk penjajahan tersebut juga umumnya dinampakan dengan bentuk-bentuk eksploitasi maksimum dan penindasan terhadap suatu kaum tertentu (Reynolds, 1981: 20). Hal tersebut bisa dilihat dalam fenomena imperialisme yang paling dekat dengan kita yaitu imperialisme dan kolonialisme Belanda terhadap Indonesia, dimana masyarakat pribumi dieksploitasi sedemikian rupa dalam kebijakan-kebijakan kerja rodinya. Di samping itu, hasil imperialisme juga dapat digambarkan ke dalam bentuk organisasi politik seperti Commonwealth, French Union, koloni Amerika Serikat, dan sebagainya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam konteks imperialisme kultural, negara *periphery* cenderung menggantungkan nasibnya kepada negara *core* dengan mengimpor komoditas-komoditas yang ditawarkan. Hal itu dikarenakan oleh ketidakmampuannya dalam menciptakan pemasukan ekonominya sendiri karena telah dilemahkan melalui penjajahan dan penaklukkannya. Demikian imperialisme kultural sebagai produk insidental dari imperialisme politik dan ekonomi berguna untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya terhadap wilayah *periphery* tertentu.

Ekspedisi Pamalayu sebagai Diplomasi Kultural

Setelah mengetahui tentang beberapa konsep serta preposisi mengenai diplomasi kultural dan imperialisme kultural, maka tibalah saatnya untuk mengidentifikasi apakah ekspedisi Pamalayu

lebih cocok tergolong sebagai diplomasi kultural ataukah imperialisme kultural. Pada dasarnya, ekspedisi Pamalayu secara umum lebih nampak sebagai diplomasi kultural daripada imperialisme kultural. Hal itu pun didasarkan pada beberapa alasan serta pertimbangan. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya ekspedisi Pamalayu juga mengandung sedikit corak imperialisme kultural di dalamnya. Hal itu dinampakan utamanya ketika raja Kertanegara memutuskan untuk mengirim sebagian besar pasukan Singasari yang dipimpin oleh komandan perang Kebo Anabrang. Tidak hanya itu, sesampainya pasukan Singasari di pelabuhan Melayu, mereka juga bergegas mengambil alih lalu lintas perdagangan di selat Melaka sehingga kapal-kapal yang datang bisa sampai ke pelabuhan Jawa. Pendudukan pasukan Singasari di pelabuhan tersebut secara praktis mengindikasikan adanya cara-cara pendekatan yang tidak mirip dengan kerangka berdiplomasi, namun lebih kepada keinginan untuk menaklukkan bumi Melayu, sehingga cenderung terlihat sebagai upaya mengimperialisasi kerajaan Malayu Dharmasraya. Hal itu berkaitan dengan penjelasan Robert Cecil yang menggarisbawahi konsep imperialisme sebagai penggunaan ekonomi – politik yang dominatif terhadap bangsa lain yang memiliki kondisi ekonomi – politik yang relatif lebih lemah (1971: 4). Sebagaimana imperialisme kultural adalah produk insidental dari imperialisme politik dan ekonomi guna mempertahankan hegemoni kekuasaannya terhadap wilayah *periphery* tertentu.

Meski dalam pendekatannya ekspedisi Pamalayu lebih cocok diidentifikasi sebagai imperialisme, namun sejarah mencatat bahwa selama ekspedisi Pamalayu berlangsung tidak ada indikasi konflik maupun peperangan beserta ambisi dari Singasari untuk menguasai bumi Melayu seutuhnya. Motif raja Kertanegara mengirim seluruh pasukan militernya dan komandan perangnya adalah tidak banyak tercatat, namun hal tersebut masuk akal apabila diartikan sebagai tindakan hati-hati apabila terjadi perpecahan dengan pihak Melayu secara mendadak. Sebagaimana dalam seni berdiplomasi memang benar bahwa prosesnya mengutamakan perdamaian, namun sekiranya hal tersebut tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan koersif apabila cara-cara damai tidak memungkinkan dalam pencapaian kesepakatan (*common ground*). Dengan demikian pihak Singasari telah siap dengan segala resiko peperangan yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, eksistensi konflik ataupun perang melawan penjajah adalah konsekuensi yang harus dihadapi dari kegiatan imperialisme. Apabila ekspedisi Pamalayu dimengerti dalam kerangka diplomasi kultural, maka dapat dilihat bahwa agenda atau tujuan nasional Singasari saat itu adalah untuk membendung meluasnya pengaruh Tiongkok yang gejalanya dapat dilihat dari serangan Kubilai Khan ke Jepang, Annam, Champa, dan Myanmar pasca meruntuhkan kekuasaan dinasti Song pada tahun 1274 (Bade, 2013: 34-6). Untuk itu, raja Kertanegara menginginkan persekutuan agar tercipta *common ground* sehingga pihak-pihak yang tergabung di dalamnya turut bersama-sama memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Upaya untuk menciptakan *common ground* antara pihak Singasari dan Melayu tersebut dicapai melalui cara-cara pelibatan *soft power* yaitu produk kulturalnya. Raja Kertanegara mengutus empat pembesar kerajaan (menteri) untuk mengantarkan arca Amoghapāsa lokeswara yang merupakan perwujudan boddhisatwa ke bumi Melayu. Singasari pada saat itu memiliki reputasi sebagai wilayah dengan seni memahat yang maju, bahkan salah satu dari yang terbaik, di antara kerajaan-kerajaan lainnya. Kecanggihan dan kemajuan seni memahat di Singasari dipengaruhi oleh arus India, khususnya Bengal (Sedyawati, 2012: 238). Sebagaimana pemberian arca tersebut dapat diartikan sebagai model simbolik dari diplomasi kultural, yang mana pemberian arca Amoghapāsa lokeswara yang megah tersebut memproyeksikan kebesaran dan kemajuan budaya Singasari sebagai modal prestisenya. Demikian pemberian arca tersebut juga disambut oleh rakyat dan raja kerajaan Melayu dengan penuh sukacita, sehingga raja Tribuwanaraja Mauliwarmadewa tidak segan langsung menghadiahkan kedua putrinya, Dara Jingga dan Dara Petak, kepada kekuasaan Singasari.

Selanjutnya, bukti bahwa ekspedisi Pamalayu lebih cocok diidentifikasi sebagai diplomasi kultural adalah bisa dilihat ke dalam hasil maupun konsekuensi dari ekspedisi tersebut. Ekspedisi Pamalayu yang ditujukan untuk membangun kesepahaman bersama (*common ground*) dalam rangka membendung masuknya pengaruh Tiongkok yang kian meluas, pada akhirnya menghasilkan *output* yang tidak mirip dengan imperialisme. *Output* imperialisme umumnya dinampakkan melalui adanya kekuasaan dominan yang menguasai wilayah tertentu. *Output* dari ekspedisi Pamalayu ini sendiri cenderung lebih damai, diantaranya adalah keputusan pihak Melayu untuk menjadi pihak yang netral dalam persetujuan antara Tiongkok dan Jawa. Netralitas pihak Melayu ini bisa dilihat melalui hubungan antara Melayu dengan Tiongkok yang terlihat baik-baik saja pasca ekspedisi Pamalayu. Bahkan pihak Melayu juga sempat mengirimkan utusannya dalam misi penghormatan terhadap dinasti Yuan, tepatnya pada tahun 1281 (Hall, 2011: 237). Kebijakan Melayu yang lebih memilih untuk non-blok ini bukan berarti diplomasi kultural yang dilakukan oleh pihak Singasari gagal. Setidaknya Singasari pun berhasil untuk mempengaruhi Melayu agar tidak ikut arus Tiongkok, atau tergabung ke dalam persekutuan Tiongkok. Dalam kata lain, hal tersebut menurut S.L. Roy merupakan salah satu tujuan ideologis dari diplomasi secara umum, yaitu memasukkan sebanyak mungkin negara ke dalam ideologinya dan apabila hal itu tidak mungkin maka paling tidak menetralsirkannya agar tidak ikut ke kubu lawan (1995: 15).

Di samping itu, hasil dari ekspedisi Pamalayu sebagai diplomasi kultural adalah meningkatnya kerjasama ekonomi-perdagangan dengan dibukanya pelabuhan Melayu dan meningkatnya kontrol Singasari terhadap pelabuhan tersebut. Selanjutnya, meningkatnya hubungan persahabatan di antara keduanya, terlebih raja Tribuwanaraja Mauliwarmadewa bergegas menghadiahkan kedua putrinya kepada pihak Singasari, yang mana hal tersebut pun lantas menghasilkan keturunan hibrid Melayu-Jawa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ekspedisi Pamalayu sebagai diplomasi kultural juga berperan dalam penyebaran kebudayaan Jawa hingga ke Sumatra, yaitu budaya Panji. Melalui budaya Panji yang menyebar hingga ke Sumatra, bahkan menyebar hingga ke wilayah Asia Tenggara lainnya, membuktikan bahwa Jawa pada saat itu berada pada masa kejayaan dan keagungan budayanya, di mana Jawa bahkan mampu mengeksport tidak hanya komoditas rempah-rempah tetapi juga budayanya. Kekayaan Jawa tidak dipungkiri terkenal hingga ke Tiongkok dan Eropa. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila pihak kerajaan Melayu Dharmasraya bersedia bekerjasama dengan Jawa, hal itu pun menjadi kehormatan atau prestise sendiri untuk memiliki relasi persahabatan yang baik dengan Jawa, negeri yang kaya.

Simpulan

Ekspedisi Pamalayu adalah sebuah sejarah hubungan internasional nusantara yang terjadi jauh sebelum masa modern, bahkan sebelum terbentuknya sistem negara *Westphalia*. Ekspedisi Pamalayu dipercaya merupakan realisasi gagasan ekspansionis raja Kertanegara, serta sebagai salah satu upaya membendung pengaruh ekspansionis Tiongkok. Sebelum terjadinya ekspedisi Pamalayu, tidak dipungkiri situasi Asia Tenggara tengah terancam oleh upaya imperialisme Tiongkok. Khubilai Khan, seorang kaisar dinasti Yuan yang terkenal akan kebesarannya, mulai menguasai beberapa wilayah Asia seperti Jepang, Annam, Champa, dan Myanmar tepatnya pasca meruntuhkan kekuasaan dinasti Song pada tahun 1274. Di saat yang sama, dominasi Jawa juga mulai tumbuh dan berkembang menggantikan Sriwijaya yang runtuh secara perlahan. Melihat ancaman yang kian mendekat, raja Kertanegara memiliki visi untuk mempersatukan nusantara agar tidak terpengaruh oleh Tiongkok dengan cara membuat kerajaan vasal. Disebutkan dalam kitab *Negarakertagama* bahwa raja Kertanegara telah mengadakan setidaknya empat kampanye militer semasa pemerintahannya: dua kampanye militer melawan sesama kerajaan Jawa pada

tahun 1270 dan 1280, perang melawan Melayu pada tahun 1275, dan serangan terhadap Bali tahun 1284.

Berangkat dari rumusan masalah, ekspedisi Pamalayu yang di dukung oleh kekuatan bersenjata pada akhirnya berakhir damai tanpa melibatkan konflik ataupun peperangan. Menurut halnya, istilah Pamalayu memiliki arti “perang melawan Melayu”. Untuk itu, peneliti menekankan pembahasan penelitian ini pada bagaimana ekspedisi Pamalayu dapat diinterpretasi sebagai upaya diplomasi kultural daripada imperialisme kultural. Menurut hipotesis yang telah disediakan, alasan ekspedisi Pamalayu lebih cocok disebut sebagai diplomasi kultural adalah didasarkan pada tiga aspek, yaitu: pendekatan, proses, dan hasil. Dari segi pendekatan, diplomasi kultural sebagai bagian dari diplomasi publik secara umum dilakukan menggunakan cara-cara yang terbuka. Keterbukaan diplomasi kultural saat itu dinampakan ketika pihak Singasari melakukan unjuk atau pameran produk kulturalnya melalui pengiriman arca Amoghapāśa Lokeśwara yang dilakukan secara terbuka sehingga disambut dengan penuh suka cita oleh raja dan rakyat Melayu Dharmasraya. Kedua, dilihat dari prosesnya, ekspedisi Pamalayu tergolong sebagai diplomasi kultural karena di dalamnya melibatkan pertukaran budaya berupa pemberian arca patung Amoghapāśa Lokeśwara untuk ditempatkan di Melayu. Ketiga, Ekspedisi Pamalayu dapat dikatakan sebagai diplomasi kultural karena terdapat hasil yang kooperatif di antara keduanya, tidak disertai perseteruan, dan berujung pada hubungan persahabatan di antara keduanya yang meningkat.

Berangkat dari situ, peneliti pun menemukan fakta-fakta sejarah yang mendukung hipotesis tersebut. Meski istilah Pamalayu memiliki arti “perang melawan Melayu”, berdasarkan penelitian dan sudut pandang yang digunakan oleh penulis, ekspedisi Pamalayu masih lebih cocok digolongkan sebagai praktik diplomasi kultural ketimbang imperialisme kultural. Meski demikian tidak dipungkiri bahwa ekspedisi Pamalayu mula-mula dilakukan dalam kesan-kesan imperialistik, terutama ketika banyaknya pasukan Singasari yang datang dan menduduki pelabuhan Melayu. Penguasaan Singasari terhadap pelabuhan internasional Melayu sebagai salah satu upaya mengintervensi ekonomi menyebabkan sumber pemasukan ekonomi Melayu yang dihasilkan dari perdagangan internasional, khususnya ekspor lada, terganggu.

Sementara itu, ekspedisi Pamalayu memiliki proses interaksi dan hasil akumulatif yang mirip dengan diplomasi kultural. Sebagaimana diplomasi kultural diartikan sebagai pertukaran ide atau gagasan, informasi, seni dan aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan masyarakatnya untuk mendorong adanya pengertian dan pemahaman bersama (*common ground*). Dalam rangka mendorong terciptanya *common ground*, diplomasi kultural menggunakan atribut-atribut atau instrumen budaya, yang mana dalam ekspedisi Pamalayu dinampakan melalui pemberian arca Amoghapāśa Lokeśwara. Arca tersebut juga merupakan salah satu bukti kemajuan peradaban budaya Singasari mengingat saat itu kesenian patung di Singasari merupakan salah satu yang terbaik. Reputasi yang demikian lantas menjadi prestise tersendiri bagi Singasari, sehingga raja beserta rakyat kerajaan Melayu yang diberi patung tersebut pun menyambutnya dengan penuh suka dan cita.

Ketiadaan konflik berkepanjangan antara pasukan Singasari dengan pihak kerajaan Melayu Dharmasraya juga menjadi satu indikator yang membenarkan bahwa ekspedisi Pamalayu lebih layak dikategorikan sebagai diplomasi kultural ketimbang imperialisme kultural. Imperialisme kultural yang merupakan produk insidental dari imperialisme politik dan ekonomi, secara umum kerap berafiliasi dengan kolonialisme dan konflik sipil yang biasanya berbasis perlawanan terhadap penjajahan. Sehubungan dengan hal tersebut, imperialisme kultural adalah perpanjangan dari imperialisme politik dan ekonomi untuk meningkatkan ketergantungan negara *periphery* (yang dijajah) terhadap negara *core* (penjajah), ehingga mereka akan terus mengimpor

komoditas-komoditas ekonomi, politik, maupun kultural, seperti ideologi, bahasa, budaya, dan cara hidup dari negara *core*. Sementara itu, pelaksanaan negosiasi yang damai untuk mencapai kesepakatan bersama merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dari sebuah diplomasi secara umum. Meski kenyataannya dalam seni berdiplomasi juga tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan kekuatan koersif (*hard power*) apabila kepentingan nasional tidak bisa dicapai melalui diplomasi. Hal tersebut juga terbilang logis dalam menjelaskan keputusan raja Kertanegara yang mengirim bala tentaranya ke bumi Melayu guna mewaspadai kemungkinan penggunaan kekuatan koersif bila diperlukan ketika cara-cara damai gagal.

Pasca ekspedisi Pamalayu, kondisi kerajaan Melayu juga tidak banyak yang berubah kecuali kondisi pelabuhannya yang kian dikontrol oleh Jawa dan ketiadaan putri raja Tribuwanaraja Mauliwarmadewa karena dipersembahkan sebagai hadiah kepada raja Singasari. Kerajaan Melayu juga cenderung bersikap netral dalam menanggapi persetujuan antara Jawa dan Tiongkok. Tidak ditemui catatan yang menyatakan perilaku sentimen Melayu terhadap Tiongkok. Pun sekitar tahun 1281, Melayu juga masih mengirimkan dua orangnya dalam misi penghormatan kepada kekaisaran Tiongkok, Khubilai Khan. Netralitas Melayu menjadi suatu aspirasi *common ground* terendah yang diharapkan oleh pihak Singasari, di mana, sebagai tujuan ideologis, harapan terbesarnya adalah Melayu bersedia untuk bergabung dalam kubu Singasari dan bersama-sama membendung masuknya pengaruh Tiongkok yang kian meluas.

Kendati demikian, aspek kultural yang dihasilkan dari ekspedisi Pamalayu terhadap bumi Melayu adalah tersebarnya kebudayaan Panji yang telah eksis sejak era Singasari. Buktinya dapat dilihat pada relief-relief candi Jago yang menceritakan kisah Panji Kunjarakarna. Bukti tersebarnya budaya Panji hingga ke Sumatra adalah kemunculan cerita-cerita Panji khas Melayu yang biasa dikenal sebagai Hikayat. Beberapa hikayat khas Melayu yang cukup terkenal diantaranya adalah: Hikayat Hang Tuah yang ceritanya sering diadaptasikan ke dalam cerita anak hingga perfilman, Hikayat Pandawa Lima, Hikayat Patani, dan lain-lain. Tidak hanya itu, konsekuensi lainnya adalah kelahiran sosok raja atau pemimpin yang berdarah campuran, Melayu – Jawa, seperti raja Jayanegara dan Adityawarman. Raja Adityawarman yang lantas memerintah kerajaan Pagaruyung secara langsung turut menyebarkan kebudayaan Majapahit, sebagai suksesor kerajaan Singasari, ke bumi Melayu seperti keyakinan Buddha-Syiwa dan macam-macam praktik ritual Tantra.

Sehingga dengan mengungkap beberapa fakta sejarah dan menganalisisnya dalam perspektif Hubungan Internasional, ekspedisi Pamalayu dapat diverifikasi benar merupakan praktik diplomasi kultural yang terjadi di Nusantara jauh sebelum digagasnya sistem *Westphalian states*. Sementara negeri-negeri Barat saat itu masih disibukkan dengan beragam masalah peperangan barbar dan persoalan dengan gereja, Jawa, sebagai salah satu kekuasaan yang terkenal di Asia selain Tiongkok, telah terbilang cukup maju dan berperadaban tinggi dalam mengimplementasikan kepentingan nasionalnya. Selama ini kita selalu diberikan pengetahuan mengenai kemajuan-kemajuan cara berpikir *a la* Barat, di mana kita melupakan bagaimana kecerdikan para leluhur dalam upaya mempersatukan Nusantara. Seni diplomasi kultural yang menurut tulisan-tulisan para akademisi Barat baru dipopulerkan oleh Perancis abad ke-19, nyatanya pernah diimplementasikan oleh kekuasaan Singasari jauh 600 tahun sebelumnya. Demikian penelitian ini pun masih memiliki area abu-abunya yang memberikan ruang atau peluang kesempatan bagi para akademisi lain yang tertarik untuk mengkaji praktik-praktik hubungan internasional Nusantara kuno. Penelitian ini sebagian besar memfokuskan pembahasannya pada aktivitas diplomasi kultural era Singasari, tanpa memberi penjelasan empiris dan komprehensif tentang aktivitas-aktivitas penundukan atau imperialisme yang pernah dilakukan oleh raja Kertanegara di daerah-daerah lain, seperti: Madura, Bali, dan beberapa wilayah Jawa lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Bade, D., 2013. *Of Palm Wine, Women and War: The Mongolian Naval Expedition to Java in the 13th Century*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bullock, A. dan Stallybrass O. ed., 1977. *The Fontana Dictionary of Modern Thought*. London: Fontana Book.
- Cummings, Milton C., 2003. *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey*. Washington DC: Center for Arts and Culture.
- Hall, Kenneth R., 2011. *A History of Early Southeast Asia Maritime Trade and Societal Development, 100–1500*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Hardjowardojo, P., 1965. *Pararaton*, Malang: Bhratara.
- Muljana, S., 1976. *A Story of Majapahit*. Singapura: Singapore University Press.
- , 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- , 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Reynolds, C., 1981. *Modes of Imperialism*. NY: St. Martin's Press, Inc.
- Roy, S.L., 1995. *Diplomasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sedyawati, E., 2012. Kerajaan Singasari: Kehidupan Religi dan Seni. Dalam: *Indonesia dalam Arus Sejarah: Kerajaan Hindu-Buddha*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Jurnal Ilmiah

- Cecil, R. 1971. Cultural Imperialism. *Monograph Series*, 6, hlm. 1-15.